

Implementasi Kebijakan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Di Kecamatan Durai Kabupaten Karimun

Nurpaliza Nurpaliza

Program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji

Edy Akhyari

Program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji

Okparizan Okparizan

Program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji

Korespondensi penulis: nurpaliza0407@gmail.com

Abstract. *This study discusses the Implementation of Health Insurance Administration Agency Policies at the Durai District Health Center, Karimun Regency. This research refers to the policy implementation model of the Van Metter and Van Horn models, with variables of policy size and objectives, resources, characteristics of implementing agents, attitudes/dispositions of implementers, inter-organizational communication and implementing activities. The data collection techniques are carried out by observation, interviews, and documentation. The data obtained was then analyzed using steps including data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results showed that the implementation of the Health Social Security Administering Body Program Policy at the Durai District Health Center, Karimun Regency was not optimal and there were still deficiencies that still needed to be corrected. The arrangement of human resources should run optimally so that the program can continue running, there are still gaps in the use of infrastructure in obtaining free health services, and there are still poor people who have not yet received a BPJS card. The Durai Health Center as the executor of the BPJS program is expected to further intensify socialization regarding free health services, for example by conducting counseling and placing banners so that information about the BPJS program can reach remote villages.*

Keywords: *Implementation, Public health center, Health Security Administering Body Program*

Abstrak. Penelitian ini membahas mengenai Implementasi Kebijakan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Di Puskesmas Kecamatan Durai Kabupaten Karimun. Penelitian ini mengacu pada model implementasi kebijakan model Van Metter dan Van Horn, standard dan ukuran kebijakan, sumber daya dan insentif tersedia, kualitas hubungan antar organisasi, karakteristik lembaga pelaksana, lingkungan ekonomi, sosial dan politik, dan disposisi atau tanggapan para pelaksana. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan langkah-langkah meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses komunikasi sudah melibatkan pihak-pihak terkait seperti staf puskesmas bagian farmasi pelayanan, pendaftaran dan menanggungjawab program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (PBJS) Kesehatan, beserta masyarakat yang berobat dipuskesmas sebagai penerima kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Didalam indikator standar dan ukuran kebijakan masyarakat diprioritaskan dalam mendapatkan kartu BPJS. Selanjutnya dalam indikator sumber daya dan insentif tersedia, sarana prasarana masih minim. Kemudian kualitas hubungan antar organisasi diberikan sudah baik. Pada karakteristik lembaga pelaksana sedikit kurang dengan ada perbedaan pembayaran dari masyarakat penerima kartu BPJS. Selanjutnya lingkungan ekonomi, sosial dan politik tindakan dari pemerintah memberikan pelayanan yang baik. Kemudian pada indikator disposisi atau tanggapan para pelaksana, dimana sikap pelaksana sudah baik dan memiliki komitmen dalam implementasi kebijakan.

Katakunci: Implementasi, Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Puskesmas

LATAR BELAKANG

Pelayanan kesehatan di kabupaten karimun dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan khususnya, pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Karimun telah diselenggarakan Program Jaminan Kesehatan Kabupaten Karimun, untuk seluruh masyarakat terkhusus nya Masyarakat kurang mampu .Penerapan program badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan di Kecamatan Durai yang dialurkan dari pemerintah untuk masyarakat mendapatkan sebuah asuransi kesehatan di berlakukan untuk golongan miskin yang di tanggung oleh pemerintah yang dicabangkan di Tanjung Balai Karimun, untuk memperoleh informasi, diamanatkan telah berjalan selama 8 tahun sejak mulai beroperasi pada 01 Januari 2014. Memasuki tahun ke-9, Puskesmas Kecamatan Durai membuka layanan tatap muka, untuk peserta dapat melakukan berbagai layanan seperti pendaftaran klaim BPJS, perubahan data, permintaan informasi dan layanan lainnya.

Seiring melonjaknya jumlah penduduk di berbagai daerah di Indonesia, tak terkecuali di daerah Kecamatan Durai Kabupaten Karimun,. Sehingga peneliti mengambil lokasi tersebut Dimana pada tahun 2019 jumlah penduduk Kecamatan Durai Kabupaten Karimun berkisar 164, 38 jiwa, lalu pada tahun 2020 mencapai 166,31 jiwa, kemudian mengalami kenaikan 2021 yakni mencapai 170,24 jiwa , atau 80% jiwa diantaranya termasuk dalam kategori penduduk miskin. Dari total jumlah Penduduk Kecamatan Durai Kabupaten Karimun dengan jumlah penerima kartu BPJS di Kecamatan durai keseluruhan yaitu 4.600 jiwa , sehingga sangat membantu masyarakat miskin untuk pengobatan di Kecamatan Durai (Redaksi Karimun, 2021).

Kebijakan BPJS diharapkan dapat mempermudah masyarakat yang kurang mampu untuk berobat, akan tetapi banyak permasalahan secara teknis dan pelayanan, maka dari itulah perlunya sosialisasi mendalam mengenai program BPJS dan penambahan Sumber daya manusia, sehingga program ini dapat berjalan dengan baik.

KAJIAN TEORITIS

Penyelenggara Jaminan sosial Kesehatan, Penelitian ini memperluas studi Tri Samnuzulsari, Wayu Eko Yudiatmaja (2018), Doni Septian, Yozi Rahmadeni (2021), Tati Sudiarti, Soedarto Soepangat, Teguh Wiyono (2019), Abitian Priya (2020), Evi Susanti Sinaga (2021), Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini, pertama belum melihat kebijakan jaminan kesehatan nasional di puskesmas maka penelitian memiliki kontribusi teoritis memperluas studi-studi sebelumnya melalui permasalahan pertama, pelayanan yang menurun, kedua kurangnya fasilitas sarana prasarana, dan ketiga, perbedaan pembayaran

antara penerima BPJS dan tidak penerima BPJS.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menghasilkan prosedur analisis dan tidak menggunakan data statistik atau cara kuantifikasinya berbeda. Secara prosedur menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Objek dan Lokasi Penelitian

Lokasi dari penelitian ini adalah di Puskesmas Durai Jalan Kapten Mukhtar, Kecamatan Durai.

Fokus penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah kajian tentang implementasi program BPJS di Puskesmas Kecamatan Durai Kabupaten Karimun.

Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung yang berhubungan dengan penelitian dan mampu memberikan informasi

2. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder. Data sekunder berupa data-data yang sudah tersedia

Teknik Pengumpulan Data

- 1) Observasi: dilaksanakan dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian, dengan maksud memperoleh gambaran empirik pada hasil temuan.
- 2) Wawancara: dilakukan terhadap informan yang telah ditentukan untuk mendapatkan data dan informasi yang lebih jelas dan mendalam tentang berbagai hal yang diperlukan, yang berhubungan dengan masalah penelitian.
- 3) Studi Dokumentasi: Teknik ini dilakukan untuk memperoleh data skunder yang berhubungan dengan fokus penelitian.

Informan

Informan penelitian yaitu penelitian yang berpandu pada subjek yang dimana mereka teliti dari penelitian yang diperoleh, dan juga memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai masalah yang ingin diteliti sehingga informasi yang diberikan bermanfaat. Dan juga berfungsi sebagai umpan balik terhadap data penelitian (Burhan Bungin), 2010. Adapun Informan yang dipilih pada penelitian ini yaitu Dinas Kesehatan, BPJS, Puskesmas, dan masyarakat yang berobat di Puskesmas Kecamatan Durai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek dan Lokasi Penelitian

Gambaran Umum Kecamatan Durai Kabupaten Karimun

a. Letak Geografis Kecamatan Durai

Menunjuk kepada Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999. Pada awal terbentuknya wilayah Kabupaten Karimun terdiri dari 3 (tiga) kecamatan yakni Kecamatan Karimun, Kecamatan Moro dan Kecamatan Kundur. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun nomor 16 tahun 2001, maka wilayah Kabupaten Karimun dimekarkan menjadi 8 (delapan) kecamatan, dan akhirnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun nomor 10 tahun 2004 dimekarkan lagi menjadi 9 (sembilan) kecamatan dan jumlah kelurahan sebanyak 22 Kelurahan dan 32 desa, 327 RW (Rukun Warga) dan 945 RT (Rukun Tetangga), wilayah kabupaten Karimun kembali mekar menjadi 12 Kecamatan, termasuk didalamnya kecamatan Durai, melalui perda, Kabupaten Karimun memiliki 42 desa dan 29 kelurahan.

Gambaran Umum Puskesmas Kecamatan Durai

a. Profil Puskesmas Kecamatan Durai

Puskesmas Kecamatan Durai terletak dalam wilayah Kecamatan Durai pada kilometer 1 poros jalan Desa Telaga Tujuh-Pelabuhan menuju ke 4 Desa lainnya salah satunya Desa Semembang yang harus di seberangi. Puskesmas Kecamatan Durai berdiri sejak tahun 2012 (Profil Baru Karimun Durai).

b. Tugas Pokok dan Fungsi Puskesmas Kecamatan Durai

Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dengan kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat.

Sumber Daya Manusia

Sumber daya yang utama dalam implementasi program adalah sumber daya manusia (staf). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh manusianya yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementer saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan staf yang cukup serta memiliki kemampuan yang sesuai untuk menjalankan program tersebut. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas Kecamatan Durai, dari tenaga medis dan non-medis. Untuk kecukupan tenaga medis, dapat dilihat pada tabel dibawah, dan terlihat angka kecukupan untuk pelayanan medis di puskesmas cukup terlaksana dengan baik dengan jumlah tenaga medis yang cukup memenuhi kebutuhan di Puskesmas. Berikut data tenaga medis di Puskesmas Kota Kecamatan Durai Tahun 2023 yang terdiri dari pegawai tetap (PNS) dan pegawai tidak tetap.

B. Hasil Penelitian

a. Identitas Informan

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan peneliti mengenai Implementasi Kebijakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Kecamatan Durai Kabupaten Karimun, dapat di lihat dalam BPJS masih banyak terdapat kekurangan sehingga belum sepenuhnya dikatakan maksimal. Dalam penelitian ini, jumlah informan sebanyak.

Tabel 1 Identitas Informan

No	Nama Informan	L/P	Umur (Tahun)	Jabatan
1.	Ratna Wati S.Kep	P	43	Pelayanan Farmasi
2.	Soraya S.Kes	P	27	Penanggung Jawaban Program BPJS
3.	Nurbaiti S.Kep	P	40	Pelayanan kesehatan lingkungan
4.	Seniwati	P	33	Pasien
5.	Ina	P	41	Pasien
6.	Ainun	P	64	Pasien

Sumber : Olahan Peneliti,202

b. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

a. Kesehatan Tanggungjawab Ketersediaan Fasilitas

Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang di buat oleh pemerintah bertujuan meningkatkan akses, pemerataan dan mutu pelayanan

kesehatan terhadap seluruh penduduk Kecamatan Durai Kabupaten Karimun dengan pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien .

Berikut kutipan hasil wawancara peneliti dengan Pelayanan Farmasi Ibu Ratna Wati S.Kep pada hari Senin 27 Februari 2023 yang mengatakan bahwa:

"yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Gratis adalah masyarakat yang kurang mampu dengan membawa Surat Keterangan Tidak Mampu yang dari desa/kelurahan Peraturan yang di cantumkan di Dasar hukum dari program BPJS sebagai kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah kecamatan Durai pada dua peraturan Perundang-Undangan yaitu, pada dasarnya berpedoman peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007 tentang pembagian Kewenangan Pusat dan Daerah, Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan tanggungjawab ketersediaan fasilitas"

b. Menciptakan Program yang Baik

a) Program Lingkungan

Kebersihan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, melainkan juga menjadi tanggung jawab warganya. Pemerintah memang sudah mengeluarkan program untuk menjadikan kota bersih dan sehat. Akan tetapi program saja tidak cukup.

b) Delapan Alur Pelayanan

Kebijakan pemerintah yang mewajibkan masyarakat menunjukkan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan setiap kali mengakses layanan publik, memiliki tujuan baik. Aturan ini menunjukkan komitmen negara dalam menjaga kesehatan masyarakat.

Berikut kutipan hasil wawancara peneliti dengan Pelayanan Farmasi Ibu Soraya S.Kes pada hari Jumaat 08 Maret 2023 yang mengatakan bahbahwa:

1. Pasien datang akan langsung diterima oleh petugas dan menanyakan kepentingan dari pasien.
2. Setelah pasien mengatakan tujuannya untuk berobat, petugas akan mengarahkan pasien untuk mengambil nomor antrian serta melakukan pengecekan berkas penjaminan pasien, apakah peserta tersebut merupakan peserta BPJS.

3. Jika berkas lengkap, maka akan diarahkan langsung ke bagian administrasi Program Pelayanan BPJS Kesehatan yang khusus ada pada sisi kiri ruang pendaftaran.
4. pasien mengantri untuk melakukan registrasi di bagian administrasi, jika setelah diperiksa oleh pihak administrasi dan ternyata datanya lengkap, maka pihak administrasi akan menyatakan bahwa pasien sudah terdaftar dan dapat memperoleh layanan yang dibutuhkan, petugas akan memberikan nomor antrian, ataupun pelayanan yang dibutuhkan oleh pasien. Pasien tidak membayar apapun pada proses administrasi maupun setelah proses pengobatan selesai.
5. Pasien akan diarahkan menuju ruang poli ataupun ruang pelayanan medis yang dibutuhkan oleh petugas puskesmas.
6. Setelah dipanggil nomor antrian berobatnya dan selesai mendapatkan pengobatan, pasien bisa langsung ke bagian farmasi Puskesmas Kecamatan Durai jika ternyata pasien bisa rawat jalan.
7. Jika obat sudah ditebus dan diberikan pengarahannya mengenai pedoman minum obat, pasien boleh langsung meninggalkan puskesmas. Pasien tidak mengeluarkan biaya apapun untuk menembus obat.
8. Jika pasien ternyata harus dirujuk untuk mendapatkan pelayanan lainnya pasien akan kembali ke bagian administrasi dan menyerahkan surat rujukannya, kemudian petugas administrasi harus merujuk ke rumah sakit rekanan atau rumah sakit yang sudah bekerjasama

C. Refleksi Teoritis

Menurut temuan dari teori Edward dan, Van Metter Van Horn ada beberapa indikator dari teorinya yaitu Standar dan sasaran kebijakan ukuran dan tujuan kebijakan, Sumber daya Karakteristik organisasi pelaksana, Sikap para pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, Lingkungan sosial, ekonomi, sosial dan politik. Memiliki kesamaan dengan teori Edward yaitu, faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor sikap, struktur birokrasi. indikator yang memiliki kesamaan yaitu indikator sumber daya nya dan komunikasi.

Namun Edward dan, Van Metter Van Horn tidak melihat dari tiga aspek yaitu peraturan badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan, menciptakan program yang baik, aturan pengurus badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan, tetapi peneliti menemukan tiga aspek ini yang menjadi acuan peneliti dalam penelitian ini, Melalui hasil wawancara secara

menyeluruh, novelty atau kebaruan di dalam penelitian ini adalah pada konteks bagaimana implementasi kebijakan jaminan kesehatan nasional di puskesmas Kecamatan Durai Kabupaten Karimun.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti melalui teknik analisis data yakni observasi wawancara, dan Dokumentasi, dengan judul implementasi Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Kecamatan Durai Kabupaten Karimun, dengan kontribusi pengaruh pelayanan publik pada puskesmas di Kecamatan Durai adalah dengan sumber daya manusia, dilihat dari jumlah tenaga kerja dan fasilitas sarana-prasarana yang tersedia, sehingga penerapan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan mampu di jalankan sebagai contoh kinerja untuk kepuasan pasien yang berobat di puskesmas Kecamatan Durai.

Implikasi Teoritis

Penelitian ini berimplikasi terhadap kajian teori implementasi kebijakan program badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan yaitu teori Edward, dan Van Metter, Van Horn ada kesamaan indikator sumber daya dan komunikasi. Namun tidak melihat ketiga aspek tersebut yaitu aspek peraturan badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan , menciptakan program yang baik , aturan pengurus badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan.

Keterbatasan

Penelitian ini hanya berfokus pada satu instansi saja yaitu Puskesmas Kecamatan durai.

Saran

Pentingnya pemerintah Kabupaten Karimun Kecamatan Durai dan jajaran instansi terkait untuk mengoptimalkan implementasi Program Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan tujuan, visi, misi dan sasaran yang diinginkan dalam rangka terwujudnya masyarakat yang bersih dan sehat serta meringankan beban pembiayaan pengobatan dengan menambah kuota untuk keluarga tidak mampu.

DAFTAR REFERENSI

Sumber dari Buku

- Wayu Eko Yudiatmaja, 2017, Implementasi dan evaluasi Kebijakan Publik, Tanjungpinang : UMRAH Press
- Robert Eyestone, *The Threads of policy : A Study in Policy Leadership*, (Indiana :Bobbs-Merill, 1971), h.18
- George C. Edwards III. *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press, 1980
- Van Meter dan Van Horn, *Winarno, Implementasi Kebijakan Publik* (Yogyakarta) CAPS, 2012). h. 149-151.
- BPJS Kesehatan. *Buku Panduan Layanan Bagi Peserta BPJS Kesehatan* Jakarta E-book, 2022.
- Edi Suharto. *Analisis Kebijakan Publik; Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: CV. Alfabeta, 2018
- Mile dan Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif*, sumber tentang metode Metode baru. Terjemahan Jakarta: Tjetjep Rohendi Rohidi, Universitas Donesia Press, 2019
- Sugiyono . *Objek Penelitian*, Terbitan Alfabeta, 2017 oleh D Andriani
- Merilee S. Grindle. *politics and Policy Implementation in the Third World* . New Jersey: Princeton University Press, 1980.
- Neuman Lawrence *Basics Social Research Kualitatif and Q uantitative Approach Editioan II*. Publishers Design, 2017.
- William Dunn. *Analisis kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 1999.
- Charles O. Jones, *An Introduction to the study of public policy* (Third Edition. Monterey: Books/Cole Publishing Company, 1984), h. 25
- David dan Stoker, Gerry. *Theory and Methods In Political Science* . New york Bandung: Nusa Media, 2010.
- Robert, Eyestone, *The Threads of policy: A Study in Policy Leadership*, (Indapolis: Bobbs-Merril, 1971), h.18.
- Lexi.J, Moelung, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT.Remaja Rosdakarya 2014)
- Randal, B. Ripley dan Grance, A. Franklim *Bureaucracy, Policy Implementation And Howmewood*, Illinois: The Dorsey Press, 1982
- Agus Salim, *Metode Penelitian Karya Ilmiah*, (Bandung: Gema Insani, 2014) h 153
- Ali Mohammad, *Penelitian Kependidikan Prosedur dan*, (Bandung: Angkasa, 2012)
- Budi. *Kebijakan Publik* (Yogyakarta: CAPS, 2012.
- Winarno Budi. *Kebijakan Publik* (Yogyakarta: CAPS, 2012. Winarno
- Pohan , Imballo S. *Jaminan Mutu Layanan Kesehatan: Dasar-Dasar Pengertian Dan Penerapan*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2017.

Sumber Dari Undang-Undang:

- Peraturan presiden Nomor 24 tahun 2011 , tentang penyelenggaraan jaminan Kesehatan pasal 60
- Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan. Jakarta, Pemerintah Republik Indonesia.
- Republik Indonesia, “ Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2011 tentang Sistem Jaminan Sosial
- Republik Indonesia, “ Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Publik.
- Republik Indonesia “Undang-Undang Dasar, Pasal 28H. h. 21
- Republik Indonesia “Undang-Undang Dasar, Pasal 34H. h. 24

Sumber Dari Jurnal :

- Tri Samnuzulsa dan Wayu Eko Yudiatm (2018) “Clientelism and vote buying in local elections: A case study of Kartu Bintang Sejahtera”. *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, Vol. 31 (No. 1).
- Novita Anggreani, “ Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Kesehatan Penyandang Distailitas di Kabupaten Jember, *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia* “, Volume 11, 2022, no 1.
- Diponegoro, “ *Kesehatan Nasional* ” *Journal Of Social And Political Science Of Science Of Tahun 2016*
- Sabatier, Paul. “ *Top down and Bottom up Approaches to Implementation*, *Jurnal Penelitian*, Hal 21-48
- Dikutip dari keputusan Menpan No: 63 /KEP /M.PAN /7 /2003, tentang Pedoman -mum Penyelenggaraan Pelayanan Publik” diakses tanggal 23 Juli 2015.
- Dikutip dari Statistik Karimun No: 59/KAB/9/2016, tentang Wilayah Kabupaten Karimun alokasi Kecamatan Durai” diakses tahun 2020.
- Van Meter, Donald S. and Van Horn, Carl E (1975). “ The Policy Implementation Process .A Conceptual Framework”. *Administration and Society*, Vol.6 No 4. London: Sage Publications, Inc.
- Ade Irma Suryani, “*Implementasi Program Badan Penyelenggara Jaminan kese Anti Korupsi*, Volume 6, 2018, hal 2009-2024.
- Enceng Sakti *Kesehatan di Puskesmas Kecamatan Kabupaten Karimun*, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia “*Kesehatan Indonesia*” Tahun 2018
- Evi Susanti Sinaga”Evaluasi Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Provinsi DKI Jakarta, Indonesia *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, Volume 10 No 1, 2021, hal 1-9
- Yulius 2020, Indenfikasi pulau-pulau di Kabupaten Karimun, berdasarkan kaidah topomoni. *E-jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis*, 1(2), 22-59
- Horn, C .E VAN dan Donald, van.M (1975) the polity Implementa Tion Procces 6, 445-488.
- Van Meter, Donald S. and Van Horn, Carl E (1975) ‘ *The Policy Implementation Process. A Conceptual Framework*”. *Administration and Society*, Vol.6. 4 Lond,on: Sage Publications, Inc.

Dikutip dari BPJS Kesehatan, No 59/Kab Journal Panduan *Layanan Bagi Peserta* BPJS kesehatan, di akses tahun 2014.

Setiawati, M . E dan Nurriszka R. H (2019) *Evaluasi Pelaksana Sistem Rujukan Berjenjang dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional*, Jurnal Kebijakan Indonesia; JKKI, 8(1). 35-40

Pratikno. (2007), *Government dan Krisis Pelayanan Kesehatan*, jurnal Kebijakan dan Adminitrasi Publik Vol 11 nomor 2, November Hal 121-183.

Sumber dari Wawancara :

Wawancara dengan Ratna Wati, Durai 27 Februari 2023

Wawancara dengan Soraya, Durai 8 Maret 2023

Wawancara dengan Nurbaiti, Durai 8 Maret 2023

Wawancara dengan Seniwati, Durai 28 Februari 2023

Wawancara dengan Ina, Durai 3 Maret 2023

Wawancara dengan Ainun, Durai 28 Februari 2023

Sumber dari Internet :

Dikutip dari Departemen Kesehatan Situs "<http://depkes.go.id>" diakses pada tanggal 20 Juni 2015.

Dikutip dari <https://gerbangkepri.com/2021/06/03/80-penduduk-karimun-terdaftar-di-bpjs-kesehatan>

Dikutip dari evaluasi program kegiatan puskesmas Kecamatan Durai 2020 situs <https://id.scribd.com/presentation/553329569/PP>

Dikutip dari Suara Karimun <https://suara.merauke.goid/post/76/pelayanan-bpjs>